



**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2025**

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2026



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025**

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat.

Ringkasan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui dokumen ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran umum mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025, meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai inovasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar. Namun demikian, berkat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, berbagai target pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai keterbatasan dan ruang perbaikan. Oleh karena itu, Ringkasan LPPD ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang, guna mewujudkan Kabupaten Klungkung yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025. Semoga dokumen ini bermanfaat dan menjadi sarana informasi yang konstruktif bagi masyarakat





1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,15	75,89	0,98 %
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,68	9,48	(2,07 %)
3.	Persentase Pengangguran (%)	1.574	1.501	(4,64 %)
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.348.537,6	6.708.793,5	5,67 %
5.	Pendapatan per Kapita (000)	52.627,61	57.195,75	8,68 %
6.	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio	0,31	0,28	(9,68 %)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klungkung, Tahun 2025

2. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	79.85	87.16
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	87.12	98.36
3.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	37.82	27.13
4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	53.99
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	51.49

Sumber: Dinas Pendidikan kabupaten Klungkung Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2025 guna mendukung Standar Pelayanan Minimal adalah sebesar Rp. 27,863,762,721 atau sekitar 97,58% dari pagu belanja sebesar Rp. 28,555,019,865 dengan program Pengelolaan Pendidikan , serta kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah



C. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi baik karena faktor eksternal dan faktor internal beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih rendah. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan masih berbiaya tinggi.
2. Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B. Belum tersedianya sumber daya serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional menjadi faktor internal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
3. Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD kurang baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif rendah. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV yang baru mencapai 72,45%.
4. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal Angka partisipasi sekolah pada masyarakat kelompok umur 7-15 tahun masih perlu ditingkatkan.
5. Program dan kebijakan sekolah belum berorientasi pada mutu pembelajaran Nilai komposit guru dan kepala sekolah terhadap pengelolaan pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik masih rendah

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1.	Persentase kematian ibu	-	0.04
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	3.21



3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	94.41	98.25
4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	90.82	97.51
5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100
7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	100
8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	90.02	97.07
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
10.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	78.49	100
11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	100
12.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	100
13.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	100
14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2025



B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Pada tahun 2025 dalam menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung bersumber dari Dana APBD dan DAK Non Fisik Sebesar Rp. 4,130.723,286,- dengan realisasinya sebesar Rp. 3,743,973,073,- (90,64%). Dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP kepada Dinas Kesehatan rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir
4. Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita
5. Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Dinas Kesehatan:

1. Penetapan sasaran masih menggunakan sasaran estimasi
2. Kurang optimalnya pemantauan wilayah setempat (PWS) KIA
3. Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi belum optimal
4. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular
5. Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi ASIK belum optimal

b. Permasalahan Rumah Sakit:

1. Kurangnya peralatan kesehatan dan penunjang layanan di rumah sakit;
2. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar yang berlaku;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada layanan dan administrasi rumah sakit yang makin dominan sehingga meningkatnya kebutuhan peralatan teknologi informasi;
4. Pengembangan layanan yang dibutuhkan masyarakat yang makin spesialis



/subspesialis, peran dokter umum/dokter gigi makin berkurang, sehingga perlu kompetensi yang lebih tinggi sesuai standar profesi tenaga kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	-	26.11
2.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	82	82.23
3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	66.78	68.59
4.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.46	98.51



5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0	0.11
6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	74.08	74.08
7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100	100
8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	-	0
9.	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	77.9	79.71
10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	-	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun 2025, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana APBD sebesar Rp.547.439.868,- dan realisasi sebesar Rp 540.276.268,-(98,69 %) dengan 2 (dua) program unggulan yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum , kegiatannya adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatannya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM
2. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
3. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan



C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD
5. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
6. Belum sinerginya upaya implementasi SPM

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100	100
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	0	95.65
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12.25	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Pada tahun 2025, untuk Program Kawasan Permukiman kegiatan Penanganan untuk Kawasan kumuh, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.088.733.800,00 dan realisasi sebesar Rp 1.987.166.650,00 (95,14%) dengan



program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sering berubahnya penerima bantuan peningkatan kualitas rumah ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
2. Penerima bantuan memiliki keterbatasan dalam baca tulis sehingga kesulitan untuk mengurus persyaratan administrasi
3. Keterbatasan staf pada bidang perumahan dan kawasan perukiman untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari masyarakat
4. Terjadi pemahaman ganda mengenai aturan teknis program.

5. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Trantibum Linmas yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	-	66.67
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	-	100
3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	3,07	78.95
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,09	0.09



5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,56	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Sebesar Rp. 4,572,462,333 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Klungkung untuk mendukung percepatan penerapan SPM tahun 2025 sebesar Rp. 6.357.695.826,00 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung dengan realisasi sebesar 5.463.233.700 ,dengan program unggulan Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan unggulan yaitu

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Klungkung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya mutu Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena Kurangnya Sumber daya Aparatur, Baik jumlah maupun yang



- memiliki sertifikat kompetensi.
- 2. Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana baik yang dimiliki Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- 3. Masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Klungkung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebagai berikut :

- 1. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.
- 2. Secara umum masyarakat di Kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana dan upaya penanggulangannya
- 3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana.
- 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi daerah yang rawan bencana.
- 5. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	64,45	100
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100



5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	100
6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupten Klungkung Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sebesar Rp.1.209.291.132 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

2. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam rangka pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kendaraan roda 4 (empat) untuk pengantaran gepeng dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum ada
2. Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar yg sering tercecer atau tidak terdata



3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

a. Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Klungkung berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **3,5765** dan status kinerja **Tinggi**.

b. Tahun 2024

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2024 hingga saat ini **belum dirilis secara resmi**. Oleh karena itu, laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta tren perkembangan indikator pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Klungkung tetap berkomitmen untuk menyampaikan hasil evaluasi setelah laporan resmi diterbitkan sebagai dasar peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di masa mendatang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024 Kabupaten Klungkung

berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 77.A/LHP/XIX.DPS/05/2025 Tanggal 25 Mei 2025 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2025 Kabupaten Klungkung dalam proses pemeriksaan/penilaian.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 (Tarikan Data Per 23 Februari 2026) Realisasi Pendapatan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sebesar 91,27% atau terealisasi sebesar Rp 1.409.154.297.942,68 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sebesar 89,85% atau sebesar 1.451.835.278.856,37

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Klungkung
Tahun 2025



PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.543.928.995.447,00	1.409.154.297.942,68	91,27	1.475.431.453.902,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	596.338.066.018,00	495.285.159.725,95	83,05	419.878.961.800,74
4.1.01	Pajak Daerah	207.655.626.474,00	205.083.699.567,20	98,76	146.225.262.033,00
4.1.02	Retribusi Daerah	323.450.857.247,00	260.248.424.483,46	80,45	255.896.931.789,24
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.808.569.393,00	9.808.569.392,76	99,99	8.671.274.486,87
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.423.012.904,00	20.144.466.282,53	36,34	9.085.493.491,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	596.338.066.018,00	495.285.159.725,95	83,05	419.878.961.800,74
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	947.590.594.163,00	913.827.169.209,00	96,43	1.055.513.821.150,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	812.919.642.000,00	799.952.781.276,00	98,40	806.903.478.118,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.670.952.163,00	113.874.387.933,00	84,55	248.610.343.032,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	134.670.952.163,00	113.874.387.933,00	84,55	248.610.343.032,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	947.590.594.163,00	913.827.169.209,00	96,43	1.055.513.821.150,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	335.266,00	41.969.007,73	12.518,12	38.670.951,26
4.3.01	Pendapatan Hibah	335.266,00	41.969.007,73	12.518,12	37.949.626,26
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	721.325,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	335.266,00	41.969.007,73	12.518,12	38.670.951,26
	JUMLAH PENDAPATAN	1.543.928.995.447,00	1.409.154.297.942,68	91,27	1.475.431.453.902,00
5	BELANJA DAERAH	1.615.789.872.082,48	1.451.835.278.856,37	89,85	1.459.500.695.815,15
5.1	BELANJA OPERASI	1.301.006.217.889,37	1.182.458.581.379,31	90,88	1.144.377.695.972,62
5.1.01	Belanja Pegawai	776.342.403.133,00	706.147.566.969,00	90,95	585.626.292.596,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.092.526.760,37	374.756.870.569,31	88,78	399.227.196.959,62
5.1.03	Belanja Bunga	3.319.597.400,00	3.042.348.133,00	91,64	3.560.246.411,00
5.1.05	Belanja Hibah	96.088.690.596,00	95.507.595.708,00	99,39	152.310.504.006,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.163.000.000,00	3.004.200.000,00	94,97	3.653.456.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.301.006.217.889,37	1.182.458.581.379,31	90,88	1.144.377.695.972,62
5.2	BELANJA MODAL	143.778.275.110,11	118.927.782.642,06	82,71	110.769.585.761,53
5.2.01	Belanja Modal Tanah	121.992.780,00	9.922.280,00	8,13	4.342.837.851,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.821.960.921,11	27.584.581.097,36	77,00	26.097.257.905,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.515.633.169,00	38.058.765.138,30	83,61	26.211.817.189,53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.430.562.930,00	48.427.499.036,40	84,32	49.008.011.016,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.723.125.310,00	4.682.285.990,00	99,13	4.570.180.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000,00	164.729.100,00	99,83	539.481.800,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	143.778.275.110,11	118.927.782.642,06	82,71	110.769.585.761,53
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.541.238.000,00	1.882.960.343,00	19,73	8.623.938.445,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.541.238.000,00	1.882.960.343,00	19,73	8.623.938.445,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	9.541.238.000,00	1.882.960.343,00	19,73	8.623.938.445,00
5.4	BELANJA TRANSFER	161.464.141.083,00	148.565.954.492,00	92,01	195.729.475.636,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	36.547.889.083,00	24.841.302.492,00	67,96	20.325.541.454,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	124.916.252.000,00	123.724.652.000,00	99,04	175.403.934.182,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	161.464.141.083,00	148.565.954.492,00	92,01	195.729.475.636,00
	JUMLAH BELANJA	1.615.789.872.082,48	1.451.835.278.856,37	89,85	1.459.500.695.815,15
	SURPLUS/DEFISIT	(71.860.876.635,48)	(42.680.980.913,69)	59,39	15.930.758.086,85
6	PEMBIAYAAN DAERAH	71.860.876.635,48	72.910.423.733,48	101,46	66.293.225.136,63
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.224.983.223,48	82.226.983.361,48	100,00	70.951.504.950,63
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.223.983.223,48	82.223.983.361,48	100,00	70.834.504.950,63
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00	117.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.224.983.223,48	82.226.983.361,48	100,00	70.951.504.950,63
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.364.106.588,00	9.316.559.628,00	89,89	4.658.279.814,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.364.106.588,00	9.316.559.628,00	89,89	4.658.279.814,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.364.106.588,00	9.316.559.628,00	89,89	4.658.279.814,00
	PEMBIAYAAN NETTO	71.860.876.635,48	72.910.423.733,48	101,46	66.293.225.136,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	30.229.442.819,79	0,00	82.223.983.223,48

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Klungkung, Tahun 2025



5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Kabupaten Klungkung memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	“BANG KOMPAS” Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Klungkung Corporate University)	Implementasi	Program Kepegawaian Daerah	
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SISENSO Mobile	Implementasi	Program Kepegawaian Daerah	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Cuti Mobile	Implementasi	Program Kepegawaian Daerah	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Sistem Perencanaan Kebutuhan Dan Pemangku Jabatan (Si Renbut Manja)	Implementasi	Program Kepegawaian Daerah	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Srikandi Anda	Implementasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	INSTAPOLKU	Implementasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	ANTI CETIK	Implementasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	GARDA NATAH	Implementasi	Progam Pengelolaan Barang Daerah	
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SIARAN PAGI	Implementasi	Progam Pengelolaan Pendapatan Daerah	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	UPDATE KOMUNIKAS I DIGITAL PADA APLIKASI CITIGOV	Implementasi	Progam Pengelolaan Pendapatan Daerah	
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SAPA MERTUA	Implementasi	Progam Pengelolaan Pendapatan Daerah	
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	LEDOK NUSA	Implementasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Inovasi Tata Kelola	Digital	TAPEL BMD	Implementasi	Program Pengelolaan	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pendapatan Daerah	Pemerintahan Daerah				Barang Milik Daerah	
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	MAPEPADE	Implementasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	GEBER VALANG PBB P2	Implementasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	MATA INTI BPKPD	Implementasi	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Cetar PBB	Implementasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Budgeting Focus Group Discussion	Implementasi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	PENA ASMARA	Implementasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	KOPI NUSA	Implementasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SIRENBANG DA	Implementasi	Program Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah	
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	OK GAS PD	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi	Digital	E-Jurnal Inovasi Daerah	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kewenangan Daerah					
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SIASIK (Sistem Informasi Arsip Kelitbangan)	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kluster Produk Unggulan Daerah Tenun Tradisional	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Digital	Kluster Produk Unggulan Daerah Rumput Laut	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Digital	Kluster Produk Unggulan Daerah Singkong	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kluster Produk Unggulan Daerah Kelapa	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Kerispati (Kerjasama Riset Dengan Perguruan Tinggi)	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Jaring Kail Pari Hijau (Jejaring Kekayaan Intelektual Mendukung Pariwisata Hijau)	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
31	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SADAR INDAH (Satu Data Riset dan Inovasi Daerah)	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Lomba Karya Tulis dan Gagasan Inovatif (LOKASANTI)	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SIHAKI (Digitalisasi Hak Kekayaan Intelektual)	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	E-KLINIK INOVASI DAERAH	Implementasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	GEMA ARCA	Implementasi	Program Pembinaan Perpustakaan	
36	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	GEBER PASTI	Implementasi	Program Pengelolaan Arsip	
37	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	SI PEDAS MANIS	Implementasi	Program Pengelolaan Arsip	
38	Dinas Kebudayaan	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	AKSIKU	Implementasi	Program Pengelolaan Permuseuman	
39	Dinas Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	BERSAMAM U	Implementasi	Program Pengelolaan Permuseuman	
40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Sipelanduk	Implementasi	Program Pencatatan Sipil	
41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	PITRA BAKTI	Implementasi	Program Pencatatan Sipil	
42	Dinas Kesehatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Community Of Practices SAKTI	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
43	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	KRING IMUN	Implementasi	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	
44	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	TEMAN JAGA	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Ceting Dengan Jus Fe	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
46	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	AKSI PERI	Implementasi	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal	
47	Dinas Kesehatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SIPPMAS	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
48	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	GEBRAK	Implementasi	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
49	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	LANTAS SIPADU	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
50	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pillar Green Island Nusa Penida	Implementasi	Peningkatan Mutu Pelayanan Kualitas Kesehatan	
51	Dinas Kesehatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Formula Sehatku	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
52	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	PINTAS	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
53	Dinas Kesehatan	Inovasi Tata Kelola	Digital	SIMBAH (Sistem	Implementasi	Program Penunjang	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemerintahan Daerah		Informasi Limbah)		Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
54	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	CESPLONG	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
55	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	KENDHI TARO (Pengembangan Peduli Prolanis DM-HT)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
56	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DORKESMAS	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
57	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DORAMA (Digitalisasi Dokumentasi Hasil Radiologi Melalui Whatsapp)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
58	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Rekam Medis Elektronik dan Sistem Informasi Medis On Tablet (SIM-ONTA)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
59	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	KRIS Klungkung		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
60	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	GERAKAN TANGAN (GERAKAN PENINGKAT	Implementasi	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				AN KETAHANAN PANGAN) Sebagai Pengembangan Inovasi KARMETAPHIS		Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
61	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Pelestarian Kearifan Lokal Garam Kusamba	Implementasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
62	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN) BERBASIS DATA DAN PERENCANAAN	Implementasi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
63	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kemitraan Distribusi Benih Ikan Di UPTD Perbenihan Perikanan Kabupaten Klungkung	Implementasi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
64	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Strategi Revitalisasi Pengembangan Kawasan Wisata Konservasi Budi Daya Rumput Laut Nusa Penida	Implementasi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
65	Dinas Ketenagakerjaan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Beri Aku Kail Bukan Ikan	Implementasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
66	Dinas Ketenagakerjaan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Bantu Kerja Difabel	Implementasi	Program Hubungan Industrial	
67	Dinas Ketenagakerjaan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Ayo Kerja	Implementasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	FORWARD (Forum Walidata Pendukung dan Operator Data Sektoral)	Implementasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
69	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	ANTI CEMAS	Implementasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
70	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Tim Sinergi Medsos	Implementasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OP3UMKM (Optimalisasi Pendampingan Pemasaran Produk UMKM)	Implementasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	
72	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DIPTA/Digitalisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Pengembangan Dari PAN PUTU LAGAS)	Implementasi	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
73	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Cerdas Pemberian Rekomendasi BBM	Implementasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	
74	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SINERGI PLUT	Implementasi	Program Pengembangan Umkm	
75	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Tempat Olah Smpah Setempat (TOSS) Terpusat	Implementasi	Program Pengelolaan Persampahan	
76	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pondok Kompos Osaki (POKOK)	Implementasi	Program Pengelolaan Persampahan	
77	Dinas Pariwisata	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai	Non Digital	Pengelolaan Desa Wisata	Implementasi	Program Pengembangan	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah		Aan-Manduang (ADUNG)		Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
78	Dinas Pariwisata	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	GEMA KEMBANG DESTA NUSA PENIDA (Gerakan Bersama Kembangkan Destinasi Pariwisata NUSA PENIDA)	Implementasi	Program Pemasaran Pariwisata	
79	Dinas Pariwisata	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	PEMASARAN KEPARIWISATAAN KLUNGKUNG ERA BARU	Implementasi	Program Pemasaran Pariwisata	
80	Dinas Pariwisata	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Online Rertribusi Pariwisata	Implementasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
81	Dinas Pariwisata	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Creative Hub	Implementasi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
82	Dinas Pariwisata	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Bakas	Implementasi	Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DIPANGKU	Implementasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	I-Growth	Implementasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SIMANDA PENTAS	Implementasi	Program Pengelolaan Pendidikan	
86	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SIWALATRI	Implementasi	Program Pengelolaan Pelayanan	
87	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Angkutan Siswa Gratis	Implementasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	
88	Dinas Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	TAKGIT RABIES	Implementasi	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	
89	Dinas Pertanian	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SIPUTAN (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian)	Implementasi	Program Penyuluhan Pertanian	
90	Dinas Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	WASTA MANGAN	Implementasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
91	Dinas Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	BIMAJUARA	Implementasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
92	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	PAK KUMIS	Implementasi	Program Pemberdayaan Sosial	
93	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	RESI MENARI	Implementasi	Program Rehabilitasi Sosial	
94	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SIPANDU ARAH	Implementasi	Program Perlindungan Khusus Anak	
95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Hallo PPA	Implementasi	Program Perlindungan Perempuan	
96	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	LOVE NETWORKING	Implementasi	Program Pemberdayaan Sosial	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perlindungan Anak						
97	DPUPRPKP	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	PASIR JASRI	Implementasi	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi, Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analisis	
98	DPUPRPKP	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	SIPETARUNG	Implementasi	Program Penyelenggara n Jalan	
99	DPUPRPKP	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	PRAJEPATI	Implementasi	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
100	Inspektorat	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	KAMUS RISIKO	Implementasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
101	Inspektorat	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	SAPA Bumdes	Implementasi	Program Penyelenggara n Pengawasan	
102	Inspektorat	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SIAP AKSI	Implementasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
103	Kecamatan Banjarangkan	Inovasi Pelayanan Publik		SIINDAH (Edu Aksi Cinta Sampah)	Implementasi	-	
104	Kecamatan Dawan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	ERA BAPER (Evaluasi Rancangan Apbdes Berbasis Paperless)	Implementasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
105	Kecamatan Dawan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Optimalisasi Pemanfaatan Website Pada Kecamatan Dawan	Implementasi	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
106	Kecamatan Dawan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Digitalisasi Arsip Berbasis Go-Drive	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	
107	Kecamatan Dawan	Inovasi Tata Kelola	Digital	SIPANDAI GO DRIVE	Implementasi	Program PPenunjang Urusan	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
108	Kecamatan Dawan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SIJEMPOL BOOS	Implementasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
109	Kecamatan Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DIGISERT-SK	Implementasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
110	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	E-RESEP (Sistem Peresepan Elektronik)	Implementasi	Program Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	
111	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	PITRAJAGRA	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
112	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	SANTIPADU (Sistem Antrian, Informasi dan Pengaduan)	Implementasi	Anggaran BLUD Tahun 2025	
113	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	IDAMAN (IPSRs DALAM GENGAMA N)	Implementasi	Program Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit	
114	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	YANTRI KUAT	Implementasi	Program Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit	
115	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	GENI YASANDA	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
116	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	POLPRADESTA	Implementasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
117	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pos Papag Tibum	Implementasi	Program Peningkatan Ketenteraman	



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dan Ketertiban Umum	
118	Sekretariat DPRD	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	I KRAME	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
119	Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	TEMU WIRASA	Implementasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
120	Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pasar Tani	Implementasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
121	Sekretariat Daerah	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Bedah Desa	Implementasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
122	Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SEPIION (Sistem Penjadwalan Kegiatan Pimpinan Online)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
123	Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SISUKMA	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
124	Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	SIEJAAA	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
125	Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Sistem Informasi Peminjaman Ruang (SIPIRANG)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
126	Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Sistem Pembentukan Produk Hukum Daerah (Simprohuda) Kabupaten Klungkung	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
127	Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Simfoni Kesada	Implementasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Sumber: Badan Riser dan Inovasi Kab. Klungkung, Tahun 2025